DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Cendana Press, Yogyakarta, 1983.

Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Jakarta, 2001.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya,* UI Press, Jakarta, 1995.

Barry Metzger, *Legal Services to the Poor and National Development Objectives,* dalam buku *Legal Aid and World Poverty,* Preger Publishers, 1974.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary,* Seventh Edition, West Group, St Paul, Minn, 1999.

Chaeruddin Ismail, *Polisi yang Keder*, Jakarta, 2001.

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Pertama, Elex media komputindo, Jakarta, 2000.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif,* PTIK, Jakarta, 1972.

_____, *Hukum Kepolisian,* Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 1984.

PAF Lamintang, 1997.

Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum administrasi),* Laksbang Mediatama, Surabaya, 2005.

Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia(Satu Bunga Rampai),* Cetakan Pertama, Tarsito, Bandung, 1985.

_____, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum Di Indonesia*, Yuhesa, Badung, 1997.

Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku lchtiar, Jakarta, 1960.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Undang-Undang :

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Reublik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor Polisi 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Hubungan Dan Tata Cara Kerja (HTCK) Bidang Hukum Polda Jabar.

Website :

Bantuan Hukum Suatu Keharusan, http://suenherief.wordpress.com.

Frans H. Winarta, *Dasar Konstitusional Bantuan Hukum,* http;//jodisantoso. blogspot.com.

http://makalahkepolisiannegara.blogspot.com/

http://www.lawskripsi.com

http://www.lodaya.web.id

http://www.ngobrolaja.com

http://www.tempointeraktif.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki.

Pengertian Hukum Kepolisian, http://dwiasiwiyatputera.blogdetik.com.

Pengertian Polisi, http://policeline-kembey.blogspot.com.

Pengertian Tindak Pidana, http://achmadrhamzah.blogspot.com.

Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri, http://id.shvoong.com/law-and-politics/law.

Proses Penyidikan Terhadap Anggota, http://deswanarwanda.blogspot.com.

Snai, *Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri,* http://deswanarwanda. blogspot.com.

Tindak Pidana 2 Pengertian dan Unsur, http://donxsaturniev.blogspot.com.

Tindak Pidana 3 Rumusan Tindak Pidana, http://donxsaturniev.blogspot.com.

Tindak Pidana 5 Subjek Tindak Pidana, http://donxsaturniev.blogspot.com.

Visi dan Misi Polri, http://brimobpolri.wordpress.com.